

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kepala Satuan Kerja sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan satuan kerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan/atau barang pada satuan kerja.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sistematika isi catatan atas laporan keuangan;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

- **BAB 1 PENDAHULUAN**
- **BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD**
- **BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD**
- **BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI**
- **BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**
- **BAB 6 PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN**
- **BAB 7 PENUTUP**

BAB 2
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN,
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah telah sesuai dengan program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah yang mengacu pada sektor riil dengan skala prioritas bidang pertanian dan pertumbuhan UMKM dengan peningkatan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas tertinggi yang akan dicapai dan ditopang oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan efektif dengan masyarakat yang senantiasa menjunjung nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Jawa Tengah telah menetapkan Visi lima tahun mendatang yaitu :

“MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

Mboten Korupsi Mboten Ngapusi

Agar visi dapat diwujudkan maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan misi, sebagai berikut :

1. Membangun Jawa Tengah Berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, “ Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ”;
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan;
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak;
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat;
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Jateng telah dilakukan pembangunan guna :

1. Pengurangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Mengingat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan. Sejalan dengan hal tersebut perlu dilakukan pula pemberdayaan ekonomi masyarakat, perkuatan kelembagaan

penanggulangan kemiskinan dan pendayagunaan sumber daya potensial, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri.

2. Pengurangan Pengangguran

Penanganan pengangguran di Jawa Tengah berfokus pada upaya perlindungan, pemberdayaan dan pengembangan kelompok petani (buruh tani dan petani penggarap), nelayan, masyarakat terkena PHK, anak putus sekolah dan sektor UMKM. Selain itu, perlu diupayakan perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan kualitas calon tenaga kerja melalui peningkatan kualitas prasarana sarana dan pengelola Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan yang berorientasi pasar kerja, pengembangan informasi pasar kerja, serta pengembangan wirausaha baru sektor UMKM berbasis sumber daya local termasuk kewirausahaan di kalangan pemuda. Upaya penanganan pengangguran dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru yang pada akhirnya aspek-aspek produktif tersebut diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pasar tenaga kerja.

3. Pembangunan Infrastruktur

Hal terpenting yang menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur adalah upaya meningkatkan peran dan penanganan infrastruktur dalam keterbatasan kewenangan dan kemampuan penanganan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, seperti upaya penanganan rob, pembangunan pelabuhan, bandar udara, transportasi massal dan pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembebasan tanah. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan *soft power* melalui peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi; peningkatan *Public Private Parthnership* (PPP) dan penguatan kapasitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang komprehensif.

4. Kedaulatan Pangan

Kedaulatan pangan di Jawa Tengah diwujudkan melalui empat pilar, yaitu : 1) reformasi agraria dengan melindungi dan menata ulang sumber-sumber produksi pangan; 2) mewujudkan pertanian berkelanjutan melalui pemeliharaan dan pengembangan pertanian berbasis bahan baku, sumberdaya dan kearifan lokal; 3) menciptakan cadangan pangan dari surplus produksi pangan serta melakukan perdagangan pangan yang adil, yang mampu memberikan penghasilan lebih pada produsen pangan kecil; dan 4) mengembangkan pola konsumsi dan diversifikasi produk aneka pangan lokal, dan tidak hanya tergantung pada bahan pangan eksternal.

5. Kedaulatan Energi

Upaya penanganan isu strategis kedaulatan energi ini bukan merupakan upaya jangka pendek maupun menengah, tetapi merupakan upaya jangka panjang yang harus dirintis sejak saat ini, sebelum ketergantungan terhadap energi fosil semakin tak terkendali. Upaya kunci yang dapat dilakukan guna memenuhi kebutuhan energi di Jawa Tengah adalah dengan mengembangkan energi alternatif berbasis gas, sumberdaya energi baru terbarukan, maupun bahan bakar nabati, yang dikelola secara mandiri di level lokal, sesuai dengan kapasitas sumberdaya yang dimiliki Jawa Tengah.

6. Tata Kelola Pemerintahan, Demokratisasi dan Kondusivitas Daerah

Berkeenaan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tanggal 15 Januari 2014, maka dalam rangka reformasi birokrasi sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, daerah perlu mengantisipasi dengan melakukan langkah-langkah konkrit utamanya terkait pematapan sistem manajemen kepegawaian meliputi sistem perencanaan, pengembangan karier, penggajian dan batas usia pensiun pegawai aparatur sipil negara. Peran pemerintah dan partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam mewujudkan demokrasi bernegara yang baik. Namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan proses demokrasi seperti keikutsertaan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang bersifat strategis melalui forum *rembug*. Kondusivitas daerah juga masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga mampu membuka peluang investasi di wilayah Jawa Tengah dan berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2. Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, maka kebijakan keuangan khususnya yang berkaitan dengan pembelanjaan keuangan daerah diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang mendesak (urgent), penting (important), menjadi penghela (prime mover), serta pengungkit (leverage). Untuk mewujudkan hal tersebut, ditetapkan upaya peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi pembelanjaan serta penentuan sasaran pembelanjaan.

Penetapan arah belanja daerah : belanja daerah adalah belanja yang dipergunakan dalam rangka mendanai urusan pemerintahan, baik wajib maupun urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Belanja daerah ini dapat dikelompokkan kedalam belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tak terduga. Penetapan arah belanja daerah tersebut harus mempertimbangkan asas efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah
 Fungsi : Ketentraman dan Ketertiban Umum
 Sub Fungsi : Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.843.300.000	2.563.406.104	100,00	90,16	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	596.000.000	478.036.980	100,00	80,21	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	80.000.000	79.772.000	100,00	99,72	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	210.000.000	195.637.100	100,00	93,16	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	142.000.000	84.177.500	100,00	59,28	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.500.000	61.366.500	100,00	99,78	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.000.000	48.846.500	100,00	88,81	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	25.000.000	22.408.000	100,00	89,63	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	96.000.000	73.903.290	100,00	76,98	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
10	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan di luar daerah	450.000.000	439.690.990	100,00	97,71	
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	1.120.800.000	1.072.567.244	100,00	95,70	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.572.717.000	4.106.605.338	100,00	89,81	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.612.600.000	2.531.265.500	100,00	96,89	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	891.717.000	596.376.525	100,00	66,88	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	26.000.000	24.930.000	100,00	95,88	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	200.000.000	153.403.313	100,00	76,70	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Alat Komunikasi	35.000.000	24.960.000	100,00	71,31	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	807.400.000	775.670.000	100,00	96,07	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	-	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	954.300.000	936.755.000	100,00	98,16	
1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	57.000.000	56.492.500	100,00	99,11	
2	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	147.300.000	145.222.500	100,00	98,59	
3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	750.000.000	735.040.000	100,00	98,01	

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
V	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	719.283.000	710.421.900	100,00	98,77	
1	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	719.283.000	710.421.900	100,00	98,77	
VI	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	7.211.183.000	6.939.641.550	100,00	96,23	
1	Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Bidang Kesbangpol dan Linmas	1.520.000.000	1.466.101.850	100,00	96,45	
2	Kegiatan FGD Analisis Dinamika Politik Ideologi, Wasbang dan Kemasyarakatan	180.000.000	148.872.500	100,00	82,71	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
3	Kegiatan Pengawasan Orang Asing	343.800.000	340.050.000	100,00	98,91	
4	Koordinasi Pengamanan Wilayah	411.000.000	410.210.000	100,00	99,81	
5	Kegiatan Koordinasi Penciptaan Kondusifitas Daerah di Provinsi Jawa Tengah	119.058.000	118.868.000	100,00	99,84	
6	Kegiatan Pembinaan Sosial Politik	800.000.000	760.814.500	100,00	95,10	Sisa penggunaan belanja jasa publikasi
7	Kegiatan Rakor Pengkajian Masalah-masalah Strategis Daerah	180.000.000	156.425.000	100,00	86,90	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
8	Peningkatan Koordinasi & Pemantapan Kerjasama antar Daerah Kab/ Kota dan Daerah Perbatasan dlm Rangka Peningkatan Keamanan	170.000.000	160.210.500	100,00	94,24	Sisa penggunaan belanja alat tulis kantor
9	Studi Pengembangan Manajemen Konflik dan Pengelolaan Daerah Konflik	150.000.000	141.558.000	100,00	94,37	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
10	Pendidikan Budaya Politik dan Etika Demokrasi	250.000.000	248.332.500	100,00	99,33	
11	Peningkatan Demokratisasi dan HAM Bagi Kesejahteraan Rakyat	275.000.000	274.602.000	100,00	99,86	
12	Peningkatan Ideologi Negara Dalam Berbagai Dimensi Kehidupan	160.225.000	147.325.000	100,00	91,95	Sisa penggunaan belanja jasa pengajar/ narasumber
13	Pengembangan dan Peningkatan Wasbang dan Nasionalisme	550.000.000	549.122.500	100,00	99,84	
14	Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme	199.300.000	149.253.000	100,00	74,89	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
15	Kegiatan FGD Pengkajian Patologi Sosial	144.600.000	143.210.000	100,00	99,04	
16	Kegiatan Dialog dan Sosialisasi P4GN	490.000.000	489.999.000	100,00	100,00	
17	Kegiatan Penyelenggaraan Penanganan Konflik SOSial (Amanat Permendagri No.42 Th.2015)	348.000.000	315.367.200	100,00	90,62	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
19	Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi	670.000.000	670.000.000	100,00	100,00	
20	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini	250.200.000	249.320.000	100,00	99,65	
VII	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	3.667.000.000	3.623.183.000	100,00	98,81	
1	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	335.000.000	319.236.500	100,00	95,29	Sisa penggunaan belanja makan minum dan sewa kamar
2	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi Negara	285.000.000	284.800.000	100,00	99,93	
3	Kegiatan Peningkatan Penanganan Ideologi Negara & Monitoring / Faliditasi Data Perkembangan Faham Lain	280.000.000	278.264.500	100,00	99,38	
4	Kegiatan Penguatan Rekonsiliasi Elemen Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Wasbang	265.000.000	264.459.000	100,00	99,80	
5	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Seni serta Budaya Daerah	300.000.000	300.000.000	100,00	100,00	
6	Kegiatan Pemeliharaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Antar	350.000.000	350.000.000	100,00	100,00	

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Penghayat Kepercayaan					
7	Kegiatan Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Masyarakat serta Akulturasi Budaya	237.000.000	237.000.000	100,00	100,00	
8	Kegiatan Pengkajian Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	200.000.000	198.200.000	100,00	99,10	
9	Mediasi Penanganan Masalah Strategis Yang Berdampak Politis	300.000.000	291.891.000	100,00	97,30	
10	Kegiatan Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila bagi Kalangan PTN/ PTS dan Pendidik	257.000.000	253.265.000	100,00	98,55	
11	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Kesadaran Nilai-nilai Sejarah Perjuangan Bangsa	-	-	-	-	
12	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pilar Kebangsaan	285.000.000	278.362.000	100,00	97,67	
13	Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Amanat Permendagri 72/2012	180.000.000	176.300.000	100,00	97,94	
14	Kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila Bagi Perempuan	178.000.000	176.405.000	100,00	99,10	
15	FGD Penguatan Karakter Generasi Muda	215.000.000	215.000.000	100,00	100,00	
VIII	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	1.395.000.000	1.376.917.250	100,00	98,70	
1	Kegiatan Peningkatan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan Melalui Pagelaran Seni & Budaya Daerah	150.000.000	137.143.000	100,00	91,43	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
2	Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila bagi Aparatur & Elemen Masyarakat	275.000.000	271.600.000	100,00	98,76	
3	Pendayagunaan Potensi Ormas	450.000.000	448.970.000	100,00	99,77	
4	Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara	200.000.000	199.999.500	100,00	100,00	
5	Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Penguatan WASBANG & Ideologi Negara Bagi Aparatur & Elemen Masyarakat	320.000.000	319.204.750	100,00	99,75	
IX	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	2.125.000.000	2.071.762.000	100,00	97,49	
1	Fasilitasi Pemberdayaan FKDM (Amanat Permendagri No.12 Thn 2006)	300.000.000	276.812.000	100,00	92,27	Sisa penggunaan belanja makan minum
2	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian konflik Sosial	325.000.000	299.950.000	100,00	92,29	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
3	Penguatan Ruang Publik Bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Dalam Rangka Ketahanan Masyarakat	1.500.000.000	1.495.000.000	100,00	99,67	
X	Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	4.176.100.000	4.098.385.275	100,00	98,14	
1	Peningkatan & Penguatan Peran Politik Ormas/ LSM dan TOMA / TOGA	355.000.000	353.180.375	100,00	99,49	
2	Penguatan Sistem & Implementasi Kelembagaan Politik	604.000.000	596.558.000	100,00	98,77	
3	Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu / Pemilukada	298.000.000	264.355.000	100,00	88,71	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
4	FGD Penguatan Budaya dan Etika Politik Masyarakat	506.000.000	494.650.200	100,00	97,76	
5	Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu / Pilkada	436.000.000	423.297.700	100,00	97,09	
6	Pemantauan dan Pendataan Parpol di Daerah	263.000.000	262.409.000	100,00	99,78	
7	Pendidikan Politik Bagi Perempuan	800.000.000	795.855.000	100,00	99,48	
8	Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat	130.000.000	128.512.500	100,00	98,86	
9	Kegiatan Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat	784.100.000	779.567.500	100,00	99,42	

No	Program/Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi		Ket.
				Fisik (%)	Keu (%)	
1	2	3	4	5	6	7
XI	Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat dan Rakyat Terlatih	3.848.617.000	3.772.430.000	100,00	98,02	
1	Peningkatan Ketrampilan Deteksi Dini Bagi Anggota Linmas	450.000.000	448.115.000	100,00	99,58	
2	Pembinaan dan Pegerahan Hansip/ Linmas Se-Jawa Tengah	675.000.000	674.405.000	100,00	99,91	
3	Peningkatan Keterampilan PAM Lingkungan Bagi Komandan SATLINMAS	350.000.000	341.980.000	100,00	97,71	
4	Peningkatan Keterampilan Penyelamatan Di Air	472.000.000	468.040.000	100,00	99,16	
5	Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan SATLINMAS	250.000.000	230.463.000	100,00	92,19	Sisa penggunaan belanja jasa pengajar/ narasumber
6	Peningkatan Ketrampilan Pam Swakarsa	200.000.000	199.150.000	100,00	99,58	
7	Peningkatan Ketrampilan Satlinmas	150.000.000	141.335.000	100,00	94,22	Sisa penggunaan belanja perjalanan dinas dalam daerah
8	Orientasi Kesiapan Linmas Dalam Pengamanan	250.000.000	250.000.000	100,00	100,00	
9	Peningkatan Ketrampilan Pam Daerah Rawan Kamtibmas	150.000.000	130.910.000	100,00	87,27	Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan
10	Peningkatan Kemampuan Pam Terpadu	400.000.000	387.547.500	100,00	96,89	
11	Pengembangan dan Peningkatan Pengetahuan Kelinmasan	250.000.000	248.867.500	100,00	99,55	
12	Pembinaan Aparat dan Anggota Linmas se Jawa Tengah	202.717.000	202.717.000	100,00	100,00	
13	Penguatan Karakter Bagi Garda Bangsa	48.900.000	48.900.000	100,00	100,00	
XII	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	400.000.000	396.147.000	100,00	99,04	
1	Kegiatan Sinkronisasi Kesbangpol dan Linmas	400.000.000	396.147.000	100,00	99,04	
	TOTAL ANGGARAN	31.912.500.000	30.595.654.417	100,00	95,87	

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2016 telah berupaya optimal untuk mencapai target kinerja sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik, tidak ada kendala-kendala berat yang dihadapi.

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban

menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban dan akuitas dana dalam neraca.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam pengakuan dan pengukuran mencakup kebijakan harga perolehan dan kapitalisasi asset. Kebijakan harga perolehan merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan, belanja pengiriman, pajak dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan sebagaimana komponen harga perolehan asset tetap. Kebijakan kapitalisasi asset merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar imbalan lainnya yang dibayarkan nilai asset tetap.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah yang mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (Khusus DPPAD)

5.1.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.1.1.1.1.2.1. Pendapatan Retribusi Jasa Umum

5.1.1.1.1.2.2. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

5.1.1.1.1.2.3. Pendaptan Retribusi Perizinan Tertentu

5.1.1.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Pendapatan Daerah.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 43.747.577.649,-** atau **94,48 %** dari anggaran Rp **46.303.583.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 51.558.215.037,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Operasi	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 21.591.350.000,-	Rp 20.253.668.232,-	93,80	Rp 21.349.074.293,-
Belanja Barang & Jasa	Rp 24.712.233.000,-	Rp 23.493.909.417,-	95,07	Rp 30.209.140.744,-
Jumlah	Rp 46.303.583.000,-	Rp 43.747.577.649,-	94,48	Rp 51.558.215.037,-

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 20.253.668.232,-** atau **95,28 %** dari anggaran **Rp 21.591.250.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 21.349.074.293,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 15.191.173.000,-	Rp 13.922.193.232,-	91,65	Rp 14.384.003.293,-
Belanja Pegawai langsung	Rp 6.400.177.000,-	Rp 6.331.475.000,-	98,93	Rp 6.965.071.000,-
Jumlah	Rp 21.591.250.000,-	Rp 20.253.668.232,-	95,28	Rp 21.349.074.293,-

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 23.493.909.417,-** atau **95,07 %** dari anggaran **Rp 24.712.233.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 30.209.140.744,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp 1.892.308.000,-	Rp 1.856.201.600,-	98,09	Rp 2.616.757.900,-

Belanja	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan/Material	Rp 45.751.000,-	Rp 45.751.000,-	100,00	Rp 45.655.000,-
Belanja Jasa Kantor	Rp 3.762.160.000,-	Rp 3.570.944.980,-	94,92	Rp 4.887.832.175,-
Belanja Premi Asuransi	Rp 90.449.000,-	Rp 82.989.244,-	91,75	Rp 85.702.060,-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 891.717.000,-	Rp 596.376.525,-	66,88	Rp 640.499.050,-
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp 756.587.000,-	Rp 667.840.825,-	88,27	Rp 1.536.080.600,-
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	Rp 2.176.840.000,-	Rp 2.123.090.000,-	97,53	Rp 3.188.178.000,-
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 26.000.000,-	Rp 25.985.000,-	99,94	Rp 100.700.000,-
Belanja Sewa Alat Berat				
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 73.200.000,-	Rp 73.200.000,-	100,00	Rp 24.200.000,-
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 4.120.503.000,-	Rp 4.036.272.290,-	97,96	Rp 5.985.676.800,-
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	Rp 13.000.000,-	Rp 13.000.000,-	100,00	Rp 0,-
Belanja Pakaian Kerja	Rp 929.115.000,-	Rp 917.536.000,-	98,75	Rp 1.765.803.000,-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 6.788.004.000,-	Rp 6.478.413.140,00	95,44	Rp 1.424.425.488,-
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 36.000.000,-	Rp 35.650.000,-	99,03	Rp 32.650.000,-
Belanja Pemeliharaan	Rp 2.873.600.000,-	Rp 2.734.558.813,-	95,16	Rp 1.424.425.488,-
Belanja Jasa Konsultasi	Rp 45.000.000,-	Rp 44.100.000,-	98,00	Rp 154.495.000,-
Belanja Hibah Barang & Jasa Berkenaan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat				
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat	Rp 192.000.000,-	Rp 192.000.000,-	100,00	Rp 0,-
Belanja Hadiah Uang	Rp 0,-	Rp 0,-	0,00	Rp 53.500.000,-
Jumlah	Rp 24.712.233.000,-	Rp 23.493.909.417,-	95,07	Rp 30.209.140.744,-

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 770.270.000,-** atau 96,27 % dari anggaran **Rp 800.090.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 2.573.611.600,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 777.500.000,-	Rp 770.270.000,-	99,07	Rp 2.525.409.000,-
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 22.590.000,-	Rp 0,-	0,00	Rp 3.493.600,-
Jumlah	Rp 800.090.000,-	Rp 770.270.000,-	96,27	Rp 2.573.611.600,-

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Tanah

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar **Rp 770.270.000,-** atau 99,07 % dari anggaran **Rp 777.500.000,-** dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 2.525.409.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat				

Belanja Alat-alat Angkut				
Belanja Alat-alat Bengkel				
Belanja Alat-alat Pertanian				
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp 711.000.000,-	Rp 704.270.000,-	99,05	Rp 2.525.409.000,-
Belanja Alat-alat Studio	Rp 66.500.000,-	Rp 66.000.000,-	99,25	Rp 0,-
Belanja Alat-alat Kedokteran				
Belanja Alat-alat Laboratorium				
Belanja Alat-alat Keamanan				
Jumlah	Rp 777.500.000,-	Rp 770.270.000,-	99,07	Rp 2.525.409.000,-

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 0,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 44.709.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 44.709.000,-
Belanja Monumen	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	
Jumlah	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 44.709.000,-

5.1.2.1.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

5.1.2.1.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dari anggaran Rp 22.590.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 3.493.600,- dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Buku Perpustakaan	Rp 22.5950.000,-	Rp 0,-	0,00	Rp 3.493.600,-
Belanja Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan				
Belanja Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah				

5.1.2.1.3.6. Belanja Modal BLUD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Belanja Modal BLUD.

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 44.517.847.649,- sedangkan Tahun 2015 sebesar Rp 54.131.826.637,-.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 0,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 0,-

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2016 sebesar Rp 29.806.233,33 naik sebesar Rp 686.316,66 atau 2,13 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 29.119.916,67

5.2.1.1.1. Kas

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor**
- b. Kas di Bendahara Pengeluaran-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non Silpa)**
- c. Kas di Bendahara Pengeluaran-Kewajiban Pihak Lain**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

- a. Kas di Bendahara Penerimaan-SKPD**
- b. Kas di Bendahara Penerimaan-Jasa Giro yang Belum Disetor (Non SiLPA)**
- c. Kas di Bendahara Penerimaan-BLUD**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas di Bendahara Penerimaan.

5.2.1.1.1.3. Kas BLUD

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kas BLUD.

5.2.1.1.2. Setara Kas

5.2.1.1.2.1. Deposito BLUD

5.2.1.1.3. Piutang

5.2.1.1.3.1. Piutang Pajak (KHUSUS DPPAD)

5.2.1.1.3.2. Penyisihan Piutang Pajak

5.2.1.1.3.3. Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.4. Penyisihan Piutang Retribusi

5.2.1.1.3.5. Piutang Lainnya

5.2.1.1.3.6. Penyisihan Piutang Lainnya

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Piutang.

5.2.1.1.4. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2015 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2015 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2016 sebesar Rp 13.295.333,33 naik sebesar Rp 2.516,66 atau 0,02 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 13.292.816,67 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja	2016	2015
Asuransi BMD	Rp 13.295.333,33	Rp 13.292.816,67
Asuransi Pegawai Non PNS		
Sewa		
Jumlah	Rp 13.295.333,33	Rp 13.292.816,67

Rincian Belanja Dibayar Dimuka, *sebagaimana terlampir*.

5.2.1.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2016, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2016 sebesar **Rp 16.107.856,-** turun sebesar **Rp 280.756,-** atau **1,77 %** dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar **Rp 15.827.100,-** dengan rincian sebagai berikut :

Persediaan	2016	2015
Persediaan Bahan Pakai Habis	Rp 16.107.856,-	Rp 15.827.100,-
Persediaan Bahan/Material		
Persediaan Cetak		
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja		
Persediaan Makanan dan Minuman		
Persediaan Hibah		
Jumlah	Rp 16.107.856,-	Rp 15.827.100,-

5.2.1.2. Investasi Jangka Panjang

5.2.1.2.1. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir

5.2.1.2.2. Investasi Non Permanen –Diragukan Tertagih

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Investasi Jangka Panjang.

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2016 sebesar Rp 28.984.545.562,- naik sebesar Rp 764.110.000,- atau 2,71 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 28.220.435.562,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 28.984.545.562,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 770.270.000,-

Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 770.270.000,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 6.160.000,-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 6.160.000,-
Grand Total	Rp 28.220.435.562,-

5.2.1.3.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.786.143.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 11.786.143.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Tanah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-
Jumlah	Rp 11.786.143.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 11.786.143.000,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 11.786.143.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 11.786.143.000,-

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.339.051.287,- naik sebesar Rp 764.110.000,- atau 7,23 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 10.574.941.287,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Alat Berat	Rp 640.150.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 640.150.000,-
Alat Angkut	Rp 3.544.643.464,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 3.544.643.464,-
Alat Bengkel dan Ukur	Rp 85.700.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 85.700.000,-
Alat Pertanian dan Peternakan				
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 5.193.072.823,-	Rp 747.610.000,-	Rp 0,-	Rp 4.445.462.823.000,-
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.875.485.000,-	Rp 22.660.000,-	Rp 6.160.000,-	Rp 1.858.985.000,-
Alat Kedokteran				
Alat Laboratorium				
Alat Keamanan				
Jumlah	Rp 11.339.051.287,-	Rp 770.270.000,-	Rp 6.160.000,-	Rp 10.574.941.287,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 10.574.941.287,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp 770.270.000,-
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 770.270.000,-
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp 6.160.000,-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp 6.160.000,-
Grand Total	Rp 11.339.051.287,-

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 5.665.311.875,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 5.665.311.875,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Gedung	Rp 5.663.661.875,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 5.663.661.875,-
Monumen	Rp 101.650.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 101.650.000,-
Jumlah	Rp 5.665.311.875,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 5.665.311.875,-

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 5.665.311.875,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 5.665.311.875,-

5.2.1.3.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 111.870.000,- tetap sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 111.870.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-
Jaringan				
Jumlah	Rp 111.870.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 111.870.000,-

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	Rp 111.870.000,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp

Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 111.870.000,-

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 82.169.400,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0,00 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 82.169.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Aset	2016	Bertambah	Berkurang	2015
Buku Perpustakaan	Rp 80.619.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 80.619.400,-
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Rp 1.550.000,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 1.550.000,-
Hewan, Ternak dan Tanaman				
Jumlah	Rp 82.169.400,-	Rp 0,-	Rp 0,-	Rp 82.169.400,-

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : (pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)

Saldo Awal	Rp 82.169.400,-
Penambahan	
Belanja Modal	Rp
Belanja Barang/Jasa	Rp
Hibah	Rp
Mutasi Masuk	Rp
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Berkurang	
Ekstrakontable	Rp
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp
Mutasi Keluar	Rp
Koreksi	Rp
Jumlah	Rp
Grand Total	Rp 82.169.400,-

5.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Konstruksi Dalam Pengerjaan.

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2016 sebesar Rp 10.245.871.658,67 naik sebesar Rp 911.565.612,17 atau 8,90 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 9.334.306.046,50 dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2016	2015
Alat Besar	Rp 160.037.500,00	Rp 80.018.750,00
Alat Angkut	Rp 2.734.203.464,00	Rp 2.541.065.706,00
Alat Bengkel	Rp 85.700.000,00	Rp 85.700.000,00
Alat Pertanian		
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 4.037.249.623,00	Rp 3.601.618.423,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.622.617.000,00	Rp 1.536.041.000,00
Alat Kedokteran		
Alat Laboratorium		
Alat Keamanan		
Gedung	Rp 1.539.491.405,00	Rp 1.428.218.167,50
Monumen	Rp 26.429.000,00	Rp 24.396.000,00
Jalan dan Jembatan		
Bangunan Air dan Irigasi		
Instalasi	Rp 40.143.666,67	Rp 37.248.000,00
Jaringan		
Jumlah	Rp 10.245.871.658,67	Rp 9.334.306.046,50

5.2.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp 15.880.000,- turun sebesar Rp 7.940.000,- atau 66,67 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 23.820.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan	2016	2015
Aset Dikerjasamakan		
	2016	2015
Aset Tak Berwujud	Rp 39.700.000,-	Rp 39.700.000,-
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp 23.820.000,-)	(Rp 15.880.000,-)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto		
	2016	2015
Barang Rusak Berat		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Netto		
Jumlah Aset Lainnya	Rp 15.880.000,-	Rp 23.820.000,-

5.2.1.5.1. Aset Dikerjasamakan

5.2.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 39.700.000,- naik/turun sebesar Rp 0,- atau 0 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 39.700.000,-

5.2.1.5.3. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2016 sebesar Rp 23.820.000,- naik sebesar Rp 7.940.000,- atau 66,67 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 15.880.000,-

5.2.1.5.4. Barang Rusak Berat

5.2.1.5.5. Penyusutan Barang Rusak Berat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Barang Rusak Berat dan Penyusutan Barang Rusak Berat.

5.2.2. KEWAJIBAN

5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.1.1.1. Utang Jangka Pendek Pihak Ketiga

5.1.1.1.2. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

5.1.1.1.3. Pendapatan Diterima Dimuka

5.1.1.1.4. Utang Belanja

5.1.1.1.5. Utang Jangka Pendek Lainnya

5.1.1.1.6. Utang bagi hasil pajak kepada Kabupaten/Kota (DPPAD)

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.2.3. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar Rp 18.784.360.136,66 turun sebesar Rp 154.709.295,51 atau (0,82) % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 18.939.069.432,17

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

5.3.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah (DPPAD)

5.3.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

5.3.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.3.1.2. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Kewajiban Jangka Pendek/Utang.

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2016 sebesar Rp 44.666396.944,51 turun sebesar Rp 7.655.376.008,83 atau 17,14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 52.321.772.953,33

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2016 sebesar Rp 44.666396.944,51 turun sebesar Rp 7.655.376.008,83 atau 17,14 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 52.321.772.953,33

Beban	2016	2015
Beban Pegawai	Rp 20.253.668.232,-	Rp 21.349.074.293,-
Beban Barang & Jasa		
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
Beban Lainnya		
Jumlah		

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2016 sebesar Rp 20.253.668.232,- turun sebesar Rp 1.095.406.061,- atau 5,41 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 21.349.074.293,-

Beban	2016	2015
Beban Pegawai Tidak langsung	Rp 13.922.193.232,-	Rp 14.384.003.293,-
Beban Pegawai Langsung	Rp 6.331.475.000,-	Rp 6.965.071.000,-
Jumlah	Rp 20.253.668.232,-	Rp 21.349.074.293,-

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2016 sebesar Rp 23.493.223.100,34 turun sebesar Rp 6.713.766.947,83 atau 28,58 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 30.206.990.048,16,-

Beban	2016	2015
Beban Persediaan	Rp 7.535.917.915,-	Rp 12.209.353.800,-
Beban Jasa	Rp 5.920.306.707,34,-	Rp 8.440.293.039,16,-
Beban Pemeliharaan	Rp 3.330.935.338,-	Rp 2.064.924.538,-
Beban Perjalanan Dinas	Rp 6.478.413.140,-	Rp 7.046.268.671,-
Beban Barang & Jasa Lainnya	Rp 227.650.000,-	Rp 86.150.000,-
Jumlah	Rp 23.493.223.100,34,-	Rp 30.206.990.048,16,-

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2016 sebesar Rp 919.505.612,17 naik sebesar Rp 153.797.000,- atau 16,73 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp 765.708.612,17,-

Beban	2016	2015
Beban Penyusutan Aset Tetap	Rp 911.665.612,17,-	Rp 757.768.612,17,-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	Rp 7.940.000,-	Rp 7.940.000,-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat		
Jumlah	Rp 919.505.612,17	Rp 765.708.612,17

5.3.2.1.4. Beban Lain-Lain

5.3.3. Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional

5.3.3.1. Surplus/Defisit Penjualan/Pelepasan Aset Tetap Non Lancar

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah **TIDAK ADA** Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2016	2015
Ekuitas Awal	Rp 18.939.069.432,17	Rp 17.344.814.748,50
Surplus/Defisit-LO	(Rp 44.666.396.944,51)	(Rp 52.321.772.953,33)
RK-PPKD	Rp 44.517.847.649,00	Rp 54.131.826.637,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(Rp 6.160.000,00)	(Rp 215.799.000,00)
• Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(Rp 6.160.000,00)	(Rp 207.859.000,00)
1. Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	(Rp 6.160.000,00)	
2. Korekse/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi Antar Aset Tetap		Rp 684.859.000,00
• Koreksi/Penyesuaian Amortisasi		(Rp 7.940.000,00)
1. Koreksi/Penyesuaian Tambah Amortisasi		(Rp 7.940.000,00)
Ekuitas Akhir	Rp 18.784.360.136,66	Rp 18.939.069.432,17

BAB 6

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol dan Linmas) merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

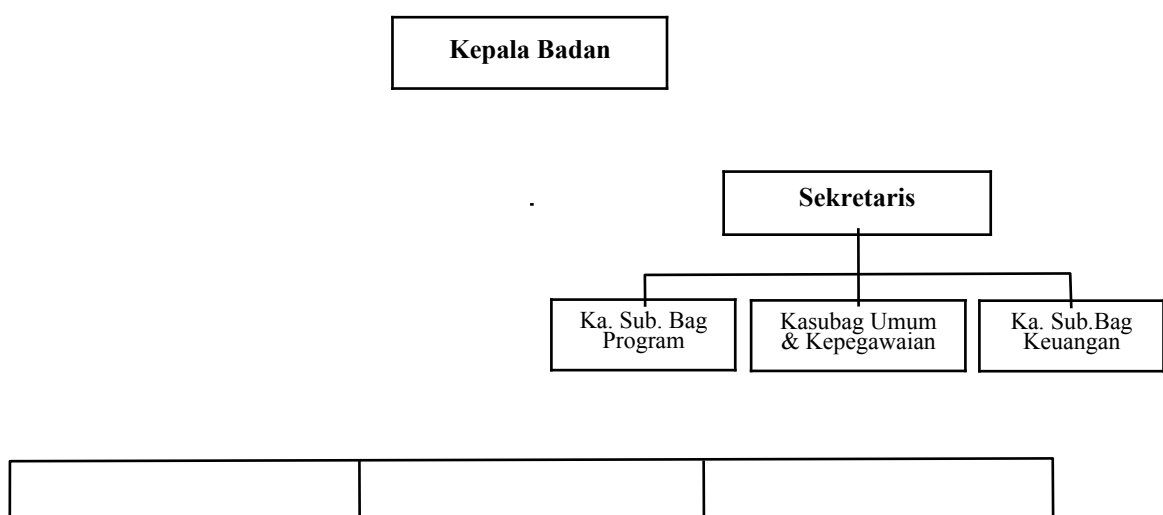
Pada Perda Nomor 7 Tahun 2008 Pasal 20 dinyatakan bahwa Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol dan Linmas menyelenggarakan fungsi :

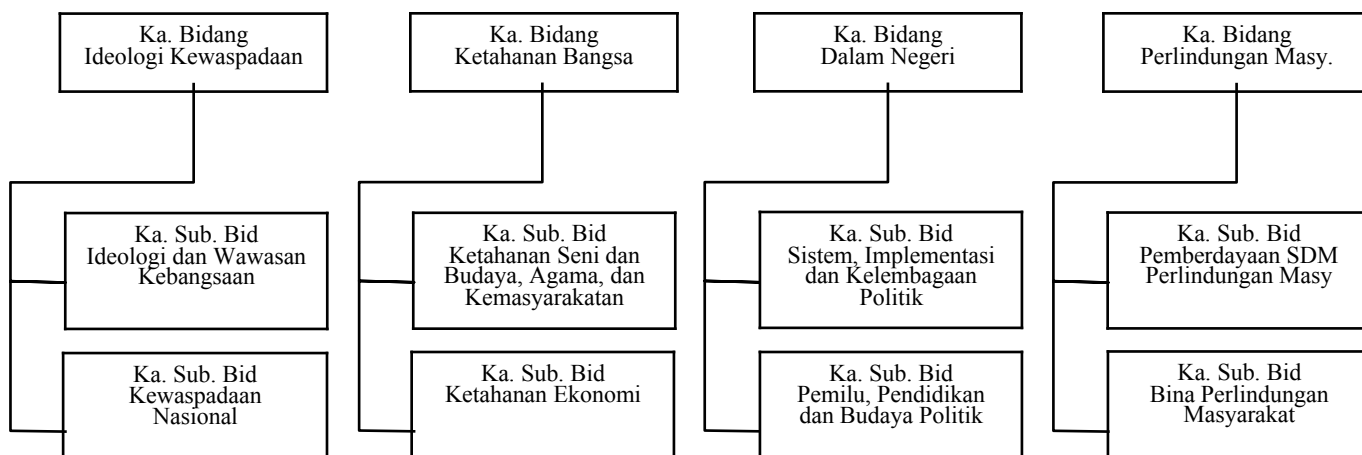
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan struktur organisasi Badan Kesbangpol dan Linmas menurut Perda Nomor 7 Tahun 2008 terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - 2. Subbidang Kewaspadaan Nasional.
- d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi.
- e. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Subbidang Sistem, Implementasi dan Kelembagaan Politik;
 - 2. Subbidang Pemilu, Pendidikan dan Budaya Politik.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Bina Perlindungan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.





6.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat, maka strategi dan kebijakan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat.
- b. Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

Arah Kebijakan : Meningkatkan kegiatan pendidikan politik tentang ideologi politik, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI.

2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan di masyarakat dalam rangka peningkatan kewaspadaan nasional.

Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini dalam rangka penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
- b. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran KOMINDA, FKUB, FKUB, FPBI, di masyarakat.

3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat

Strategi :

- a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan politik khususnya pemilihan umum.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik di masyarakat tentang etika dan budaya politik demokrasi
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Strategi :

- a. Peningkatan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
- b. Peningkatan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peran masyarakat dalam mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
- b. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Strategi :

- a. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Peningkatan fasilitasi dalam rangka membangun sinergi antar kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif.

Arah Kebijakan :

- a. Meningkatkan peningkatan pengetahuan dan kualitas pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. Memfasilitasi kerjasama dan sinergi antar daerah dan kelompok masyarakat guna mewujudkan stabilitas masyarakat Jawa Tengah yang kondusif.

6.3. Data Kepegawaian

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 98 orang PNS yang bekerja di Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 15 orang pegawai berpendidikan Strata 2 (Pasca Sarjana), 42

orang berpendidikan Strata 1 (sarjana), 3 orang berpendidikan Diploma 3, 33 orang berpendidikan SLTA, 3 orang berpendidikan SLTP, dan 2 orang pegawai berpendidikan SD.

Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng

Menurut Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Strate 2	15
Strata 1	42
Diploma 3	3
SLTA	33
SLTP	3
SD	2
Total	98

Sedang berdasarkan golongan kepegawaian, dari 98 orang PNS, terdiri dari Golongan II 16 orang; Golongan III 67 orang; Golongan IV 15 orang; dan pejabat eselon 16 orang pegawai.

Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng

Menurut Kepangkatan

Golongan II	Jumlah	Golongan III	Jumlah	Golongan IV	Jumlah
II/a	2	III/a	3	IV/a	9
II/b	7	III/b	31	IV/b	5
II/c	5	III/c	13	IV/c	-
II/d	2	III/d	20	IV/d	1
	16		67		15

Pegawai Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jateng

Menurut Golongan

Pejabat Eselon	Jumlah
Eselon II	1
Eselon III	5
Eselon IV	10
-	16

6.4. Tindak Lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Oktober 2016 pengalihan pegawai Badan Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota menjadi pegawai kemendagri dan secara resmi per Januari 2017, Badan Kesbangpol sudah beroperasi sebagai instansi di bawah kendali kemendagri. Namun dengan penundaan pengesahan RPP yang menjadi payung hukum vertikalisasi Badan Kesbangpol itu, maka Badan Kesbangpol tetap menjadi satuan perangkat daerah, dengan tetap mendapatkan alokasi penganggaran 2017 dari APBD.

Selain itu dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj

Tahun 2016 tentang tindak lanjut PP NO. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 122 ayat (1) menyatakan bahwa "Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan" dan ayat (2) yang berbunyi "Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan".

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan aturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. pada ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Pada ayat (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Sehingga pada tahun 2017, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah berubah nomenklatur menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan untuk Bidang Perlindungan Masyarakat bergabung dengan Sapol PP Provinsi Jawa Tengah.

6.5. Laporan Pendataan Inventarisasi BMD yang Mengalami Pengalihan

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada BAB VII Ketentuan Lain-lain Pasal 11 ayat (2) "Dalam hal Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik." Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa urusan Perlindungan Masyarakat telah beralih ke Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, sehingga perlu adanya pengalihan Barang Milik Daerah dari Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah beralih ke Satpol PP Provinsi Jawa Tengah. Berikut Laporan Pendataan Inventarisasi BMD yang Mengalami Pengalihan :

DATA ASET YANG RENCANA AKAN DISERAHKAN

KE SATPOL PP PROV. JATENG

No	Uraian	Volume	Nilai Barang
1	2	3	4
A.	02.03 ALAT-ALAT ANGKUT	20	711.287.020
B.	02.04 ALAT-ALAT BENGKEL	16	10.700.000
C.	02.06 ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	97	140.097.677
D.	02.07 ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	20	34.000.000
	Jumlah	133	862.084.677

BAB 7 **PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2016. Di dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan ini, struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, walaupun belum sepenuhnya mengikuti Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana diatur didalamnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dalam rangka penyempurnaan untuk penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah pada periode yang akan datang.

Pt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Ketahanan Bangsa

Daftar Lampiran Tambahan

Daftar lampiran tambahan antara lain meliputi :

1. Lampiran 1.2 Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
2. Lampiran II Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Cetak SIMDA)
3. Daftar Aset Tetap Tahun Anggaran 2016.
4. Daftar Aset Lainnya Tahun Anggaran 2016.
5. Daftar Dana Bergulir Tahun Anggaran 2016.
6. Berita Acara Stock Opname Tahun Anggaran 2016.
7. Berita Acara Serah Terima Aset Tahun Anggaran 2016.
8. Berita Acara Penghapusan Aset dan Hibah Aset Tahun Anggaran 2016.
9. Lampiran lain terkait dengan penjelasan dalam CaLK (bila ada).

***Catatan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD**

1. Cover Buku Pertanggungjawaban APBD dapat ditambahkan gambar menurut SKPD.
2. Penyusunan narasi CaLK menggunakan jenis huruf Times New Roman 11.
3. Penyusunan tabel CaLK menggunakan jenis huruf Arial 8.
4. Pencetakan Buku Pertanggungjawaban APBD menggunakan jilid spiral dan diberi kertas pembatas di setiap bab.

5. Penyerahan buku pertanggungjawaban sebanyak 3 (tiga) eksemplar disertai softcopy dalam bentuk CD.